



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

SELEKSI TERBUKA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA DAN DEPUTI GUBERNUR DKI JAKARTA
TAHUN 2020

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2931/KASN/10/2020 perihal Rekomendasi rencana Seleksi Terbuka JPT Madya di lingkungan DKI Jakarta dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5423/SJ perihal Persetujuan penunjukkan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Seleksi Terbuka ini merupakan seleksi untuk menetapkan calon pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.b).
2. Peserta seleksi terbuka berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruh Indonesia (secara Nasional), sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 110 ayat (2) yang menyebutkan "Pengisian JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional" dan Pasal 117 ayat (3) huruf a menyatakan "Terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat dan JPT Madya pada Instansi Daerah provinsi". Adapun Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.b) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lowong, yaitu:

NO.	NAMA JABATAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Nasional
2.	Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Nasional
3.	Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi	Nasional

Keterangan Deskripsi jabatan dapat dilihat dalam website:
<https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>

II. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan untuk melamar pada Jabatan yang lowong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki jenjang pangkat serendah-rendahnya satu tingkat di bawah persyaratan pangkat dalam jabatan yaitu Pembina Utama Muda (IV/c);
3. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun (lahir setelah bulan Desember 1962);
4. Sedang atau pernah menduduki sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang berbeda, kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang tugasnya) jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
5. Memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat;

6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas maupun dalam rumpun jabatan yang diduduki terkait dengan jabatan yang dipilih paling singkat selama 7 (tujuh) tahun secara kumulatif;
7. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhir, kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir;
9. Semua unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Politik;
12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (dilengkapi sebelum tahapan wawancara);
13. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkotika Nasional (dilengkapi sebelum tahapan wawancara); dan
14. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Tahun 2020.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus menyertakan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Persetujuan Pindah secara Definitif dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya **(FORM 4)**.
2. Diutamakan yang memahami sosial kultur tentang kemasyarakatan budaya DKI Jakarta dan pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II.
3. Persyaratan khusus untuk jabatan dapat dilihat pada website : <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>

IV. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. **Pendaftaran secara daring (*online*)**
 - a. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*).
 - b. Setiap peserta mengisi data secara baik dan benar.
 - c. Peserta hanya dapat mendaftar untuk 1 (satu) jabatan.
 - d. Peserta yang telah melakukan pendaftaran secara daring (*online*) harus mencetak (*print*) beberapa formulir dalam *website*, terdiri dari :

JENIS FORM	NOMOR FORM
<ul style="list-style-type: none"> • Surat lamaran yang ditujukan kepada Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka 	FORM 1
<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Riwayat Hidup + foto 	FORM 2
<ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 	FORM 3

JENIS FORM	NOMOR FORM
• Surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Persetujuan Pindah secara Definitif dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya	FORM 4

- e. **FORM 1, FORM 2, dan FORM 3** harus dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani.
- f. Segala dokumen/berkas pendukung dalam persyaratan tersebut di atas agar diunggah (*upload*) pada website resmi pendaftaran, meliputi :
- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - (2) Fotokopi SK Pangkat Terakhir
 - (3) Fotokopi SK Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (apabila ada)
 - (4) Sertifikat/Tanda Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), kecuali Pejabat Fungsional
 - (5) Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) dan Pascasarjana (apabila ada)
 - (6) Fotokopi tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhir, kecuali Pejabat Fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - (7) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2019
 - (8) Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2018 dan tahun 2019
 - (9) **FORM 1** : Surat lamaran yang ditujukan kepada Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka
 - (10) **FORM 2** : Daftar Riwayat Hidup + foto (sesuai format)
 - (11) **FORM 3** : Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan tidak dalam status tersangka/ terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum, serta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
 - (12) Fotokopi Dokumen yang mendukung pengisian Daftar Riwayat Hidup antara lain : Diklat penjenjangan, Diklat Teknis/Fungsional, Penghargaan, SK riwayat jabatan dan Hukuman Disiplin (jika ada)
- g. Panduan pendaftaran seleksi terbuka dapat diakses dan diunduh (*download*) melalui website : <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>

2. Tahapan Seleksi

- a. Seleksi Terbuka
- 1) Sekretariat Panitia Seleksi akan melakukan verifikasi data pejabat dan mengumumkan hasil verifikasi tersebut melalui website resmi.
 - 2) Seleksi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.
- b. Tes Tertulis dan Penulisan Makalah
- 1) Tema penulisan makalah ditetapkan pada saat tes berlangsung.
 - 2) Tes menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- c. Tes Kompetensi
- 1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Penulisan Makalah, diwajibkan membawa semua berkas asli dan form yang telah diunduh (*download*).
 - 2) Peserta yang dinyatakan lulus Tes Tertulis dan Penulisan Makalah, diwajibkan mengikuti Tes Kompetensi.

d. Tes Kesehatan

Peserta diwajibkan mengikuti Tes Kesehatan yang dilaksanakan oleh UPT. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan bertempat di Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan kemudian.

e. Wawancara

Peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi, diwajibkan mengikuti Wawancara.

3. Hasil Seleksi

Gubernur menetapkan 3 (tiga) orang peserta seleksi terbuka dalam masing-masing jabatan untuk diajukan sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Presiden.

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Seleksi Terbuka

NO.	TAHAPAN	WAKTU
1.	Pengumuman	1 – 15 Oktober 2020
2.	Pendaftaran	1 – 15 Oktober 2020
3.	Seleksi Administrasi	2 – 17 Oktober 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	20 Oktober 2020
5.	Tes Tertulis dan Penulisan Makalah	22- 23 Oktober 2020
6.	Pengumuman Hasil Tes Tulis	27 Oktober 2020
7.	Assesment Kompetensi	2 – 10 November 2020
8.	Tes Kesehatan	5 – 6 November 2020
9.	Pengumuman Hasil Kompetensi & Kesehatan	13 November 2020
10.	Wawancara	16 – 20 November 2020
11.	Pengumuman Akhir	23 November 2020

Keterangan:

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut di atas bersifat tentatif (dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi).

- Perincian jadwal dan tempat pelaksanaan dalam masing-masing tahapan tes akan diinformasikan melalui website resmi.
- Peserta harus mengikuti setiap tahapan dalam tahapan seleksi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Terbuka.
- Seleksi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi dinyatakan tidak mengikuti tahapan berikutnya.

VI. KETENTUAN LAIN

- Peserta seleksi terbuka yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah lainnya yang terpilih untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, diwajibkan menyerahkan **FORM 4** tentang surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Persetujuan Pindah dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- Keputusan Panitia Seleksi Terbuka bersifat final dan mengikat.
- Panitia Seleksi tidak menyelenggarakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan.
- Peserta Seleksi Terbuka tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
- Seluruh biaya akomodasi, transportasi, dan biaya pribadi dibebankan kepada peserta.

